



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/560vx622>

PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN DALAM PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA

Annisya Zufais Hasibuan^{a*}, Wiro Oktavius Ginting^b

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Ilmu Administrasi Publik, annisyahsb@gmail.com,
Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara

^b Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Ilmu Administrasi Publik, wirooktaviusginting@usu.ac.id,
Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara

ABSTRACT

This study examines the role of the Medan City Food Security, Agriculture, and Fisheries Agency in fulfilling food security for female heads of households (widows due to death) in Medan Helvetia District. Using descriptive qualitative methods through interviews, observations, documentation, and literature, data were analyzed using Gade Diva's (2009) theory: regulator, dynamicator, facilitator, catalyst. The results show that the agency has attempted to carry out its role through the 2022–2024 RAD-PG policy, SIMPANG, counseling, and coordination with Bulog, but implementation has not been optimal. Limited digital access, ineffective outreach, and non-adaptive food price coordination have prevented the target vulnerable groups from being fully assisted. It is recommended to strengthen the 2024–2026 RAD-PG with a participatory and gender-responsive approach, as well as a more flexible, targeted, and sustainable direct assistance program.

Keywords: *Role of Government, Food Availability, Female Heads of Households.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan dalam pemenuhan ketersediaan pangan bagi kepala rumah tangga perempuan (janda karena kematian) di Kecamatan Medan Helvetia. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan literatur, data dianalisis menggunakan teori Gade Diva (2009): regulator, dinamisor, fasilitator, katalisator. Hasil menunjukkan dinas telah berupaya menjalankan peran melalui kebijakan RAD-PG 2022–2024, SIMPANG, penyuluhan, dan koordinasi dengan Bulog, namun implementasi belum optimal. Keterbatasan akses digital, sosialisasi yang kurang efektif, dan koordinasi harga pangan belum adaptif membuat target kelompok rentan belum sepenuhnya terbantu. Disarankan penguatan RAD-PG 2024–2026 dengan pendekatan partisipatif dan responsif gender, serta program bantuan langsung yang lebih fleksibel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Ketersediaan Pangan, Kepala Rumah Tangga Perempuan.

1. PENDAHULUAN

Keragaman ekosistem berkaitan erat dengan jumlah penduduk suatu negara, sehingga pemerintah perlu memastikan pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga. Menurut BPS (2020), rumah tangga dibagi menjadi Rumah Tangga Biasa (individu atau kelompok yang tinggal bersama) dan Rumah Tangga Khusus (dikelola yayasan atau lembaga). Kepala rumah tangga, terutama perempuan, memiliki daya tawar rendah dalam masyarakat (Yuliani, 2016; Satriawan, 2022) dan menjadi kelompok paling rentan dalam hal kemiskinan dan akses pangan, khususnya ibu tunggal (Yusrina, 2013; Choi & Jackson, 2011; UNDP, 2007). Kehilangan pasangan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap emosional, hubungan sosial,

Naskah Masuk 14 Agustus, 2025; Revisi 20 Agustus, 2025; Diterima 25 Agustus, 2025; Terbit 27 Agustus, 2025

dan pemenuhan kebutuhan makan keluarga (Atkinson & Hilgrad dalam Sawitri, 2007; Aprilia, 2013). Akses pangan merupakan faktor kunci dalam ketahanan pangan, bukan hanya ketersediaan. Pemerintah perlu menjamin distribusi, stabilitas harga, dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat (Maxwell & Smith, 1992; Nugroho, 2015). Pangan pokok penting secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia (Prabowo, 2010; Suarsana, 2020). Teori Entitlement Amartya Sen (1982) menekankan bahwa ketersediaan pangan tidak cukup; individu harus memiliki kemampuan mengaksesnya. Faktor ketersediaan pangan dipengaruhi persaingan lahan, SDM, teknologi, impor, dukungan pangan, dan keberagaman pangan (Banita, 2013; Ilham, 2024).

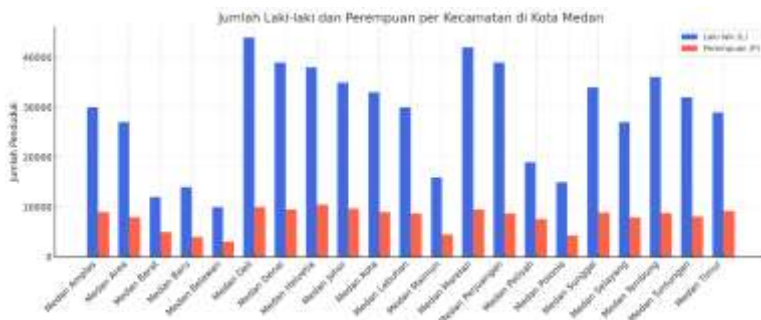
Kota Medan, sebagai pusat perekonomian Sumatera Utara, memiliki pangsa pasar besar dan berpotensi menjadi pusat perdagangan regional (Renstra DKP3 Kota Medan, 2025). Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan bertujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan, pengelolaan perikanan, pelatihan petani dan nelayan, pemantauan kualitas pangan, serta kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat. Rencana aksi daerah pangan dan gizi diwujudkan melalui Perwal No. 73 Tahun 2023 (RAD-PG 2022–2024) untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kelembagaan pangan, meski belum ada program konkret untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Pergantian Wali Kota pada 20 Februari 2025 juga belum menampilkan informasi resmi tentang RAD-PG 2024–2026. Sebagai perbandingan, Kota Tanjung Balai menjalankan RAD-PG 2021–2024 melalui UKS di sekolah dan penyuluhan pangan gizi (Bapperida Tanjung Balai, 2023), sedangkan Kota Badung, Bali, memiliki “Gerakan Pangan Lokal Sehat” untuk mendorong konsumsi pangan lokal (Distanpangan Bali, 2022). UU No. 18 Tahun 2012 Pasal 60 ayat 1 mewajibkan pemerintah memberikan akses pangan, terutama bagi kelompok rentan, termasuk kepala rumah tangga perempuan. Namun, di Medan, pemenuhan pangan masih terbatas karena ketergantungan pada impor akibat luas lahan pertanian yang terbatas dan menurun (3.700 ha tahun 2024; BPS Medan, 2024), sehingga harga dan akses pangan lokal menjadi rentan (Lubis, 2012).

Tabel 1. Tabel Penyebaran Anggaran

No	Jenis Bahan Makanan (<i>Commodity</i>)	Produksi Kotor (Ton)	Impor (Ton)
1	Padi Padian	180.647,86	1.599.247,30
2	Makanan Berpati	16.940	50.995
3	Biji Berminyak	10.402	459.446
4	Buah Buahan	11.180	312.886
5	Sayur Sayuran	17.006	485.759
6	Daging	5.228	53.364
7	Telur	0	60.631
8	Ikan	124.439	249.458
9	Minyak dan lemak	16.040,320	5.257,851
10	Gula	695	151.344
11	Susu	0	26.869

Sumber : Pemuktahiran Neraca Bahan Makanan (NBM) Kota Medan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, 2024

Berdasarkan Tabel 1, total produksi bahan makanan dari sektor pertanian menunjukkan kelompok minyak dan lemak memiliki produksi tertinggi, sementara kelompok telur dan susu tidak menghasilkan apa pun. Padi-padian menempati impor tertinggi setelah minyak dan lemak. Hal ini menyebabkan harga pangan sulit dikendalikan sehingga stabilisasi terganggu dan berdampak pada aksesibilitas pangan, khususnya kepala rumah tangga perempuan yang khawatir akan harga pangan yang tidak terkendali. Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah kelompok yang paling merasakan dampaknya. Mereka kurang berdaya dan khawatir ketika sulit mendapatkan akses pangan karena bertanggung jawab mengelola keuangan rumah tangga dan memastikan ketersediaan makanan bagi keluarganya. Menurut F. Porter dan C. Sweetman (2009), salah satu penyebab kemiskinan kepala rumah tangga perempuan adalah menjadi Ibu tunggal dengan pendapatan rendah.



Gambar 1. Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Medan Periode Semester 1 (Januari - Juni) 2022
 Sumber : Website SIGA Pemko Medan, 2022

Berdasarkan Gambar 1, kepala keluarga perempuan terbanyak berada di Kecamatan Helvetia, yaitu 10.140 perempuan. Rata-rata pekerjaan mereka adalah mengurus rumah tangga 2.811 perempuan, belum/tidak bekerja 5.245 perempuan, wiraswasta 1.798 perempuan, guru 147 perempuan, perawat 28 perempuan, pengacara 5 perempuan, dan pekerjaan lain 106 perempuan. Kepala rumah tangga perempuan yang cerai hidup sebanyak 230 orang dan cerai mati 745 orang pada tahun 2023. Pada umumnya, rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki pendidikan dan pendapatan rendah, disamping beban berat sebagai Ibu tunggal. Ukuran keluarga yang besar menurunkan tingkat pembelanjaan pangan per kapita. Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilan untuk kebutuhan dasar seperti pangan dibanding laki-laki (Wibawa, 2018). Di Kecamatan Medan Helvetia, terdapat perbedaan permintaan konsumsi pangan. Budaya “Belum kenyang jika belum makan nasi” masih melekat, membuat konsumsi beras per kapita per tahun tergolong tinggi (Silalahi, 2014).

Tabel 2. Kebutuhan Konsumsi Rumah Tangga Bahan Pangan Pokok per Hari di Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2023

No	Commodity	Tingkat Konsumsi (Kkal/Kap/Hari)
1	Padi-Padian	1.468,64
2	Umbi-Umbian	12,31
3	Pangan Hewani	206,21
4	Minyak/ Lemak	282,06
5	Buah/Biji Berminyak	93,51
6	Kacang-Kacangan	79,77
7	Gula	11,02
8	Sayur/Buah	120,73

Sumber : Analisa Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Kota Medan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, 2023

Berdasarkan Tabel 2, tingginya konsumsi pangan padi-padian dibandingkan bahan pangan lain menunjukkan kebutuhan rumah tangga terhadap pangan masih tinggi, yang berdampak pada ketersediaan dan stabilitas harga, khususnya di Kecamatan Medan Helvetia. Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga, semakin rendah tingkat keragaman konsumsi pangan (Sukmasari, 2020). Opini publik dari *Mistar.id* (2025) menyebut harga komoditas pokok per Januari 2025 di Pasar Sei Sikambing masih tinggi, terutama bumbu dapur seperti cabai. Menurut pedagang Bapak Nainggolan, harga cabai caplak mencapai Rp64.000–Rp68.000/kg dan cabai merah Rp40.000/kg. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan telah menerapkan kebijakan pangan, namun belum ada program khusus menjaga stabilitas harga selain Gerakan Pangan Murah (GPM).

Tabel 3. Nama-Nama Program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan 2024

No	Nama Program	Kerangka Pendanaan (Rp)
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.715.947.190,00
2	Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.032.446.600,00

Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan Kepala Rumah Tangga Perempuan di Kecamatan Medan Helvetia (Annisya Zufais Hasibuan)

3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.859.828.679,00
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0
5	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.700.243.450,00
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.616.628.084,00
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.410.837.927,00
8	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	45.842.108,00
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.772.385.706,00
10	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	330.777.577,00
11	Program Perizinan Usaha Pertanian	0,00
12	Program Penyuluhan Pertanian	935.931.775,00

Sumber : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan, 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Bapanas, GPM bertujuan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan pokok melalui kerja sama dengan Perum Bulog Provinsi Sumatera Utara. Program ini didanai APBN dan hanya memerlukan KTP untuk mengaksesnya. Pelaksanaannya terbatas pada hari besar keagamaan dan kurang intensif. Pagu anggaran Bapanas sebesar Rp329,95 miliar mengalami efisiensi menjadi Rp169,05 miliar (Bapanas, 2025). Koordinasi Dinas terkait dengan Perum Bulog diatur dalam Pasal 29 Perpres 66/2021 untuk menjaga stabilitas harga. Namun, informasi detail perkembangan kerja sama di Kota Medan belum tersedia. Dinas perlu memperkuat koordinasi dengan Bulog agar harga pangan di Medan, khususnya Helvetia, tetap stabil dan terkendali. Pemerintah perlu mempertimbangkan faktor yang memengaruhi harga pangan sepanjang tahun agar stabilitas terjaga dan kepala rumah tangga perempuan memperoleh akses yang lebih baik. Kasus di Boyolali, seorang nenek dikeroyok karena mencuri 2 kg bawang untuk makan, menjadi peringatan penting agar kebutuhan pangan dasar terpenuhi (Berauterkini.co.id, 2025).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan di sektor pemerintahan dikenal sebagai kebijakan publik. Kraft dan Furlong (2019) menyatakan kebijakan publik adalah tindakan atau tidak bertindak pemerintah sebagai respon terhadap isu sosial, yaitu kondisi yang dianggap tidak dapat diterima masyarakat sehingga membutuhkan campur tangan. Teori kebijakan publik menurut James Anderson adalah arah tindakan yang ditetapkan oleh aktor untuk mengatasi suatu masalah (Winarno, 2007). Konsep kebijakan publik menekankan fokus pada maksud atau tujuan, pola tindakan pejabat pemerintah yang mencakup keputusan dan pelaksanaannya, serta tindakan nyata pemerintah, bukan hanya keinginan. Kebijakan dapat bersifat positif, berupa tindakan jelas, atau negatif, berupa keputusan tanpa tindakan. Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang ketahanan pangan, dengan melaksanakan pengawasan distribusi, pengendalian harga, dan pemenuhan ketersediaan pangan, sehingga berperan penting mewujudkan tujuan kebijakan publik untuk akses pangan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

2.2. Pelayanan Publik

Perkembangan paradigma administrasi publik hingga New Public Service (NPS) menekankan hak setiap warga untuk memperoleh pelayanan yang setara, selaras dengan tujuan manajemen publik dalam melayani masyarakat dan kepentingan negara. Pelayanan publik perlu memperhatikan kualitas karena kinerja birokrasi saat ini masih kurang memuaskan masyarakat (Juhari, 2017). Pelayanan publik adalah upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai aturan (Agung, 2005) dan dilakukan dengan sistem atau metode tertentu untuk memenuhi hak masyarakat (Moenir dalam Hardiyansyah, 2018). Pemerintah berkewajiban menyelesaikan persoalan masyarakat, sementara masyarakat berhak menerima pelayanan sesuai peraturan, menjadikan pelayanan publik tolak ukur keberhasilan tugas dan kinerja birokrasi (Neneng Siti, 2016). Ketersediaan pangan termasuk aspek pelayanan publik melalui layanan pengaturan (Regulatory Service) berupa kebijakan penyediaan dan produksi pangan, serta layanan barang, yaitu pangan yang disediakan pemerintah sebagai program kebijakan pelayanan masyarakat (Ilham, 2024).

2.3. Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dijalankan seseorang sesuai kewajibannya, dan dapat dirumuskan sebagai rangkaian perilaku tertentu dari suatu jabatan. Teori peran menurut Biddle dan Thomas (1966) mencakup orang yang terlibat dalam

interaksi sosial, perilaku yang muncul, kedudukan dalam perilaku, serta kaitan antara orang dan perilaku. Peran pemerintah penting dalam menciptakan keamanan dasar, mengontrol ekonomi, dan menjamin keamanan sosial (Nyoman Sumaryadi, 2010), sebagai aktualisasi kedaulatan negara yang dikendalikan norma dan nilai (Sitanggang, 1996). Menurut Gade Diva (2009), indikator peran pemerintah meliputi: sebagai regulator, menyiapkan aturan dan kebijakan untuk ketertiban dan keadilan; sebagai dinamisator, menggerakkan partisipasi masyarakat dan memelihara dinamika pembangunan; sebagai fasilitator, menciptakan kondisi kondusif melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal; serta sebagai katalisator, mempercepat pengembangan potensi daerah dan mendorong perubahan positif di masyarakat, termasuk inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi sosial (Rasyid, 2017).

2.4. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah (Hariyadi, 2010). UU No. 18 Tahun 2012 Pasal 1 menyatakan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan harus cukup, bermutu, aman, dan bergizi seimbang. Pangan yang dikonsumsi harus menjaga kualitas agar gizi terserap maksimal dan tidak menimbulkan dampak negatif. Pangan aman bebas dari cemaran biologis, fisik, maupun kimia yang membahayakan kesehatan fisik maupun psikologis (Hariyadi, 2017). Dengan demikian, terpenuhinya pangan tidak hanya cukup dan nikmat, tetapi juga harus sehat dan aman.

2.5. Definisi Konsep

Konsep adalah representasi dari objek, peristiwa, atau ide. Menurut Sagala (2003), konsep merupakan hasil pemikiran individu atau kelompok yang dinyatakan dalam definisi sehingga menghasilkan produk pengetahuan seperti prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, atau pengalaman melalui generalisasi dan berpikir abstrak, berguna untuk menjelaskan fenomena. Konsep dapat berubah sesuai fakta atau pengetahuan baru, memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan sesuatu. Dalam penelitian ini, konsep meliputi peran pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan yang mencakup pengelolaan ketersediaan dan distribusi pangan, pengendalian harga, penyediaan layanan publik, menjaga stabilitas pasokan, mendukung kesejahteraan petani, dan melakukan intervensi saat krisis pangan. Selain itu, pemenuhan ketersediaan pangan kepala rumah tangga perempuan adalah akses dan kemampuan perempuan sebagai kepala rumah tangga untuk memperoleh, mengelola, dan menyediakan makanan cukup dan bergizi bagi keluarga, termasuk akses ke sumber pangan yang terjangkau di Kecamatan Medan Helvetia.

2.6. Kerangka Berpikir

Ridwan (2021: 18) menjelaskan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual yang melihat teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Gambar 3. Kerangka Berpikir
Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengungkap fakta atau peristiwa sebagaimana adanya dan memberikan gambaran objektif tentang permasalahan yang mungkin dihadapi. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik melalui deskripsi kata-kata dalam konteks alami dengan berbagai metode.

3.1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2013), sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan dokumen dan sumber lain bersifat pelengkap. Dalam penelitian ini, sumber data meliputi primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Observasi digunakan untuk menyelidiki tingkah laku dan kondisi nyata di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan (Sugiyono, 2018). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam dari responden dengan jumlah terbatas (Moleong, 2007; Sugiyono, 2010). Data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, literatur, dan arsip yang relevan dengan masalah penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dalam bentuk tulisan, angka, gambar, atau laporan pendukung (Sugiyono, 2018), sedangkan studi kepustakaan mencakup buku, jurnal, peraturan, dan pendapat ahli yang relevan.

3.2. Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang akan memberikan informasi dalam berlangsungnya penelitian ini. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010) teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan tertentu. Pemilihan informan dalam penelitian dilakukan dengan *purposive sampling* dengan tujuan untuk mengetahui peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dalam pemenuhan ketersediaan pangan kepala rumah tangga perempuan di Kecamatan Medan Helvetia.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (2005), yang berlangsung terus-menerus hingga tuntas. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengelompokan, dan pengorganisasian catatan lapangan untuk menajamkan informasi dan membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi secara teratur agar memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti menganalisis tema, pola hubungan, permasalahan, dan hipotesis secara kontinu untuk membentuk proposisi yang mendukung atau menyempurnakan teori.

3.4. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016) mencakup credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas melalui triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu (Wiersma dalam Sugiyono, 2016). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Triangulasi teknik mengecek data yang sama menggunakan metode berbeda, misalnya wawancara dibanding observasi atau dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang pengecekan pada waktu atau situasi berbeda untuk memastikan konsistensi data.

3.5. Teknik Validasi Data

Validasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono (2016), teknik validasi data dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, ketekunan dalam pengamatan, diskusi dengan teman sejawat, serta triangulasi. Dalam penelitian ini, validasi data ditempuh dengan memperpanjang waktu interaksi peneliti dengan informan agar data yang diperoleh lebih mendalam, melakukan pengamatan berulang untuk mengurangi kesalahan persepsi, berdiskusi dengan rekan peneliti untuk menguji konsistensi hasil temuan, serta menggunakan triangulasi baik sumber, teknik, maupun waktu untuk menguji keabsahan informasi. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih dapat dipercaya, konsisten, serta mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyajian Hasil Penelitian

Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sangat krusial, terutama dalam pemenuhan ketersediaan pangan bagi rumah tangga. Instansi ini berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kapasitas produksi lokal. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Dinas berupaya memastikan aksesibilitas, keberlanjutan, dan kualitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data dari observasi dan memfokuskan pada peran Dinas dalam pemenuhan ketersediaan pangan kepala rumah tangga perempuan di Kecamatan Medan Helvetia, dengan indikator peran pemerintah menurut Gade Diva (2009): regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Data penelitian berbentuk kata dan kalimat yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi terkait.

4.1.1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran konkrit pemerintah sebagai regulator menurut Gade Diva (2009) mencakup penetapan aturan, kebijakan, dan pengawasan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan. Dalam konteks ini, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan berperan melalui kebijakan RAD-PG 2024–2026, pemantauan stok dan harga pangan dengan SIMPANG, serta program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Urban Farming yang diarahkan pada penguatan cadangan pangan, stabilisasi harga, distribusi terintegrasi, dan perlindungan kelompok rentan, khususnya kepala rumah tangga perempuan di Kecamatan Medan Helvetia.

Urban Farming dikembangkan bersama DPD TMI untuk kemandirian pangan komunitas sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, sementara GPM digelar bekerja sama dengan Bapanas RI, BI, Pemprov, dan Bulog guna menjaga stabilitas harga menjelang hari besar. Meski efektif, program ini masih terkendala keterbatasan frekuensi dan sosialisasi.

Jika dibandingkan dengan penelitian Dwi Retno Irijayanti (2018) di Kota Batu, kesamaannya terletak pada fokus regulasi cadangan pangan, namun penelitian ini menekankan ketahanan pangan perkotaan melalui

monitoring harga dan optimalisasi pangan lokal. Sementara penelitian Andy Wardana (2024) di Sulawesi Tengah juga menemukan peran regulator dalam stabilisasi harga belum optimal, serupa dengan kondisi Medan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penekanan peran regulator yang diarahkan untuk kelompok rentan perkotaan, khususnya kepala rumah tangga perempuan, aspek yang jarang diangkat dalam penelitian sebelumnya.

4.1.2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Menurut Gade Diva (2009), peran pemerintah sebagai dinamisator adalah mendorong perubahan dan inovasi dengan kebijakan yang adaptif. Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan menjalankan peran ini melalui SIMPANG yang menyediakan data harga, stok, distribusi, dan pengaduan masyarakat secara real-time. Sistem ini membantu pengendalian harga, namun masih terkendala prediksi jangka pendek serta sosialisasi yang kurang optimal, sehingga banyak kepala rumah tangga perempuan belum merasakan manfaatnya secara langsung.

Jika dibandingkan dengan penelitian Sitompul (2019) tentang peran pemerintah dalam pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Deli Serdang, keduanya menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui program yang inovatif. Namun penelitian Sitompul lebih menekankan aspek kelembagaan dan peran kelompok tani, sedangkan penelitian ini fokus pada pemanfaatan teknologi informasi pangan untuk kelompok rentan perkotaan. Sementara itu, penelitian Luthan dkk. (2019) tentang Urban Farming di Medan menegaskan bahwa inovasi pemerintah dapat berhasil bila masyarakat dilibatkan aktif dalam setiap program. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa tanpa sosialisasi inklusif, pemanfaatan SIMPANG tidak mampu menjangkau kelompok sasaran, khususnya kepala rumah tangga perempuan di Medan Helvetia.

4.1.3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Menurut Gade Diva (2009), peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi kondusif dengan menyediakan sumber daya, informasi, dan koordinasi bagi keberhasilan program. Dalam konteks ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang mayoritas pesertanya perempuan kepala rumah tangga. Meski fasilitas memadai, sosialisasi lebih sering dilakukan saat kegiatan berlangsung sehingga tidak merata, sementara sebagian informasi hanya disebarkan lewat grup WhatsApp, yang menimbulkan ketimpangan pemahaman. Selain itu, penyuluhan rutin bagi petani, termasuk perempuan, dilakukan sesuai UUS-P3K No. 16 Tahun 2006 untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menjaga stabilitas harga pangan lokal.

Jika dibandingkan dengan penelitian Siregar (2020) tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Langkat, terdapat kesamaan bahwa penyuluhan menjadi instrumen utama fasilitasi pemerintah dalam memperkuat kapasitas masyarakat. Namun, penelitian ini menekankan pada konteks perkotaan, khususnya perempuan kepala rumah tangga di Medan Helvetia, yang jarang disentuh dalam penelitian sebelumnya. Sementara itu, penelitian Luthan dkk. (2019) mengenai Urban Farming di Medan menegaskan bahwa keberhasilan fasilitasi ditentukan oleh pendampingan berkelanjutan, sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa penyuluhan lebih berdampak daripada sosialisasi sesaat. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi baru dengan menekankan pentingnya fasilitasi pemerintah yang berorientasi gender dan menyoar kelompok rentan di wilayah perkotaan.

4.1.4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Menurut Gade Diva (2009), peran pemerintah sebagai katalisator adalah memicu dan mempercepat pembangunan dengan memfasilitasi potensi yang ada di masyarakat tanpa menjadi pelaksana utama. Dalam konteks ketahanan pangan, hal ini diwujudkan melalui koordinasi strategis pemerintah dengan Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga, distribusi pangan, dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Di Medan Helvetia, peran ini penting bagi kepala rumah tangga perempuan karena akses pangan yang terjangkau dan harga stabil sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan keluarga. Penandatanganan MoU antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perum Bulog Sumatera Utara pada tahun 2024 menjadi langkah strategis memperkuat koordinasi distribusi pangan bersubsidi. Namun, tantangan masih ada karena ketidakstabilan harga pangan di Kota Medan menunjukkan distribusi belum sepenuhnya efektif.

Jika dibandingkan dengan penelitian Lubis (2020) mengenai peran pemerintah dalam stabilisasi harga pangan di Kabupaten Serdang Bedagai, kesamaannya terletak pada pentingnya koordinasi pemerintah dengan Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan. Namun penelitian ini berbeda karena menyoroti konteks perkotaan, khususnya kelompok rentan kepala rumah tangga perempuan, yang belum banyak

diangkat dalam penelitian sebelumnya. Sementara itu, penelitian Sitompul (2019) menekankan peran pemerintah dalam penguatan kelembagaan kelompok tani, sedangkan penelitian ini menekankan koordinasi lintas institusi sebagai katalisator untuk mempercepat distribusi pangan. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi praktis dengan menegaskan bahwa katalisasi pemerintah harus diarahkan tidak hanya pada stabilisasi harga, tetapi juga pada pemerataan distribusi yang responsif gender agar benar-benar menyentuh kelompok rentan di perkotaan.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan teori Gade Diva (2009), indikator peran pemerintah mencakup fungsi sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan dan aturan yang jelas, memastikan pelaksanaan yang konsisten, serta melakukan monitoring yang terstruktur untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Fungsi ini penting dalam memudahkan akses pangan bagi kelompok rentan, khususnya kepala rumah tangga perempuan, melalui penetapan harga beras, pengawasan distribusi, dan intervensi pasar agar harga tetap stabil (Wardana, 2024). Di Kota Medan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2024–2026 sebagai lanjutan dari kebijakan sebelumnya. Namun, implementasi di lapangan masih terbatas sehingga manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Peran dinamisator tercermin dalam upaya pemerintah mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketahanan pangan. Dinas terkait telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pangan (SIMPANG) yang memudahkan pemantauan dan pengambilan keputusan terkait pangan. Meski demikian, sosialisasi sistem ini masih terbatas, sehingga kepala rumah tangga perempuan di Medan Helvetia belum sepenuhnya memanfaatkan platform digital tersebut (Irfayanti, 2018). Sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan, khususnya terkait program pangan murah (GPM) dan praktik pertanian. Pendekatan ini membangun pemahaman masyarakat secara menyeluruh, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat stabilisasi harga pangan. Penyuluhan rutin yang diberikan kepada petani, termasuk petani perempuan, menjadi sarana penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas pangan, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Peran katalisator terlihat melalui upaya pemerintah mendorong kolaborasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti kerja sama dengan Perum Bulog Provinsi Sumatera Utara melalui MoU. Pendekatan ini mempercepat pengembangan solusi terkait pasokan beras, memastikan stabilitas harga, dan meningkatkan efektivitas distribusi pangan, sehingga dampak kebijakan pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama kelompok rentan (Firdaus, 2020). Dengan demikian, keempat peran pemerintah regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator secara sinergis mendukung ketahanan pangan, meningkatkan akses pangan bagi kepala rumah tangga perempuan, dan mendorong implementasi kebijakan yang lebih efektif serta inklusif di Kota Medan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan dalam menjamin ketersediaan pangan bagi kepala rumah tangga perempuan di Kecamatan Medan Helvetia telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, implikasi praktis yang dapat menjadi perhatian bagi Dinas adalah perlunya memperkuat implementasi kebijakan RAD-PG dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan responsif gender, agar program benar-benar menyentuh kebutuhan kelompok rentan. Dinas juga perlu memperluas jangkauan layanan informasi digital dengan memastikan akses yang merata, khususnya bagi perempuan kepala keluarga yang masih kesulitan mengakses teknologi. Selain itu, intensitas dan cakupan sosialisasi program harus ditingkatkan, bukan hanya pada kegiatan penyuluhan bagi petani perempuan, tetapi juga pada kelompok perempuan kepala rumah tangga secara umum agar mereka lebih terlibat dan memperoleh manfaat nyata dari program yang dijalankan. Dari sisi katalisator, Dinas perlu memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog secara adaptif dan berkelanjutan, sehingga mampu merespons fluktuasi harga pangan lebih cepat serta menjamin keterjangkauan pangan bagi kelompok rentan. Dengan langkah-langkah ini, kebijakan dan program yang ada dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam menjamin ketahanan pangan di Kecamatan Medan Helvetia.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan yang sangat berharga, serta kepada rekan-rekan dan pihak-pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang relevan. Tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, jurnal ini tidak akan tersusun dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Cetak:

Buku

- [1] R. Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- [2] A. S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- [3] A. Santosa, Arimbi, and Horoepoetri, *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi, 2003.
- [4] K. Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- [5] B. Arifin, *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- [6] Bappenas, *Laporan Profil Kemiskinan*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021.
- [7] B. J. Biddle and E. J. Thomas, *Role Theory: Concept and Research*, 1966.
- [8] Hakim, *Etnobotani dan Manajemen Kebun Pekarangan Rumah: Ketahanan Pangan, Kesehatan dan Argowisata*. Malang: Penerbit Selaras, 2014.
- [9] T. H. Handoko, *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2016.
- [10] M. S. Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- [11] Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- [12] P. Kotler and K. L. Keller, *Marketing Management*, 15th ed. Pearson, 2016.
- [13] M. E. Kraft and S. R. Furlong, *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives*, 2019.
- [14] L. Lega, *Pengantar Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- [15] S. Maxwell and M. Smith, *Household Food Security: A Conceptual Review*. International Fund for Agricultural Development (IFAD), 1992.
- [16] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press, 2005.
- [17] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- [18] L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, p. 157.
- [19] D. Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, 2016.
- [20] H. Pasolong, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [21] Ridwan and I. Bangsawan, *Konsep Metodologi Penelitian bagi Pemula*. Jambi: Anugerah Pratama Press, 2021.
- [22] S. Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- [23] A. Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press, 1982.
- [24] S. P. Siagian, *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1970.
- [25] Sitanggang, *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- [26] Sudirja, *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Sistem Pertanian Organik*. Universitas Padjadjaran, 2008, p. 8.
- [27] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- [28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.
- [29] I. N. Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- [30] S. Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Grafindo, 2008, p. 84.
- [31] D. K. Swastika, “Penguatan kelompok tani: Langkah awal peningkatan kesejahteraan petani,” *Analisis Kebijakan Pertanian*, vol. 9, no. 4, pp. 371–390, 2011.
- [32] United Nation Development Programme, *Towards a National Action Plan to Empower Single Mothers*. Kuala Lumpur, 2007.
- [33] C. A. Wilson, *Public Policy: Continuity and Change*, 2018.
- [34] B. Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.
- [35] S. C. Winter, “Implementation perspectives: Status and reconsideration,” in B. G. Peters and J. Pierre, Eds., *Handbook of Public Administration*. Sage Publications, 2003, pp. 212–222.
- [36] M. Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- [37] S. C. Sweetman, *Martindale: The Complete Drug Reference*, 36th ed. London: Pharmaceutical Press, 2009.

Jurnal

- [38] S. Amanah, “Makna penyuluhan dan transformasi perilaku manusia,” *Jurnal Penyuluhan*, vol. 3, no. 1, 2007.
- [39] A. A. N. C. S. Nuriskia, “Perlindungan hukum pekerja dalam penerapan sistem remote working sebagai pembaharuan sistem kerja,” *USM Law Review*, vol. 5, no. 2, pp. 670–680.
- [40] V. Arumsari and W. D. E. Rini, “Peran wanita dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Economic Journal of Emerging Markets*, 2008.
- [41] J.-K. Choi and A. P. Jackson, “Fathers’ involvement and child behavior problems in poor African American single-mother families,” *Children & Youth Services Review*, vol. 33, no. 5, pp. 698–704, 2011.
- [42] S. Dewanti, “Keragaman konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Kawistara*, vol. 10, no. 3, pp. 282–294, 2020.
- [43] P. L. Luthan, Y. Nikman, H. N. Hasibuan, and J. P. A. Malau, “Pelatihan urban farming sebagai solusi ruang terbuka hijau di Lorong Sidodadi Medan Helvetia,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 25, no. 1, p. 1, 2019.
- [44] M. Nurdin, “Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa,” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014.
- [45] S. Nuryanti and D. K. S. Swastika, “Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian,” *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 29, no. 2, pp. 115–128, 2011.
- [46] R. Prabowo, “Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia,” *Jurnal Mediagro*, vol. 6, no. 2, 2010.
- [47] A. Risdianto and F. M. Jotham, “Analisis implementasi kebijakan ‘food estate’ dalam upaya perlindungan keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah,” *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, vol. 3, no. 1, pp. 50–59, 2024.
- [48] R. Firdaus, “Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara,” *Jurnal I La Galigo / Public Administration Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 61–71, 2020.
- [49] V. V. Rumawas, H. Nayoan, and N. Kumayas, “Peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan),” *Governance*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [50] D. Satriawan, “Kepala rumah tangga perempuan pekerja sektor informal di Indonesia: Situasi dan tantangan,” *Jurnal Wanita dan Keluarga*, vol. 3, no. 2, pp. 64–76, 2022.
- [51] D. Silalahi, R. Sitepu, and G. Tarigan, “Analisis ketahanan pangan Provinsi Sumatera Utara dengan metode regresi data panel,” *Saintia Matematika*, vol. 2, no. 3, pp. 237–251, 2014.

- [52] I. R. Siregar, “Analisis peran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Pasar Sukaramai,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 4, pp. 6351–6357, 2023.
- [53] K. Suarsana, “Ketahanan pangan berbasis adat (tantangan penanganan COVID-19 di Bali),” in *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 2020.
- [54] R. P. Wibawa and L. V. Wihartanti, “Strategi perempuan kepala keluarga (PEKKA) dalam menciptakan kemandirian ekonomi keluarga di Desa Gesi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen,” *Promosi: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (E-Journal)*, vol. 6, no. 2, 2018.
- [55] F. Yuliani, “Ketidakadilan gender dalam pembangunan pertanian: Studi pandangan politik perempuan anggota legislatif di Kabupaten Kudus,” *Palastren: Jurnal Studi Gender*, vol. 7, no. 2, pp. 419–440, 2016.

Peraturan Pemerintah

- [56] Badan Bimas Ketahanan Pangan, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Indikator Ketahanan Pangan*. Jakarta: Departemen Pertanian, 2015.
- [57] Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 677, 2023.
- [58] Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan, *Laporan Akhir Kajian Ketahanan Pangan*, 2023.
- [59] Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI, and WFP, *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia: A Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia 2009*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI and WFP, 2009.
- [60] ICAEW, *Assurance Engagements on Financial and Non-Financial Third Party Arrangements (Tech 10/12 AAF)*. Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 2012.
- [61] *Pemuktahiran Neraca Bahan Makanan (NBM) Kota Medan*, 2024.
- [62] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi*, 2004.
- [63] *Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Periode 2022–2024*, 2023.
- [64] Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan*, 1996.
- [65] Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2012.
- [66] *Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan*, 2025.
- [67] *Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2023*, 2023.

Referensi Elektronik:

Buku

- [68] Food and Agriculture Organization, *The State of World Fisheries and Aquaculture 2008*. Rome: FAO Fisheries and Aquaculture Department, 2009. [Online]. Available: <https://www.fao.org/3/i0950e/i0950e00.htm>

Jurnal

- [69] A. D. Syathori, “Peran perempuan dalam implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL),” *Agribest: Jurnal Ilmu Pertanian*, vol. 3, no. 2, pp. 60–67, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.32539/agribest.v3i2.791>

Web

- [70] Badan Ketahanan Pangan, *Badan Ketahanan Pangan*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2014. [Online]. Available: <https://bkp.pertanian.go.id>
- [71] Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2024 Sebesar 7,94 Persen (187,04 Ribu Jiwa)*, 2024. [Online]. Available: <https://medankota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/26/154/-penduduk-miskin-kota-medan-tahun-2024-sebesar--7-94-persen--187-04-ribu-jiwa-->
- [72] Badan Pusat Statistik, *Luas Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kabupaten/Kota*, 2024. [Online]. Available: <https://sumut.bps.go.id/id/statistics->

- [table/2/mtu0izi=/luas-panen-produksi-dan-rata-rata-produksi-padi-sawah-dan-padi-ladang-menurut-kabupaten-kota.html](#)
- [73] Berau Terkini, "Karena Bawang 2 Kilogram, Nenek di Boyolali Dihajar Massa hingga Bersimbah Darah," *Berau Terkini*, May 9, 2025. [Online]. Available: <https://berauterkini.co.id/karena-bawang-2-kilogram-nenek-di-boyolali-dihajar-massa-hingga-bersimbah-darah/>
- [74] Departemen Pertanian, *Kebijakan Pangan untuk Mewujudkan Sistem Ketahanan Pangan yang Dinamis*, 1999. [Online]. Available: <https://tanamanpangan.pertanian.go.id/en>
- [75] Goodstats, *Tingkat Kemiskinan di Kota Medan Terus Turun Hingga 2024*, 2024. [Online]. Available: <https://data.goodstats.id/statistic/tingkat-kemiskinan-di-kota-medan-terus-turun-hingga-2024-4uk2i>
- [76] GOV.UK, *Healthy Start*, 2024. [Online]. Available: <https://www.gov.uk/healthy-start>
- [77] E. Harmayani, "Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan," Talk Show Best Practice, Agrifest 2024, Pusat Inovasi Agro Teknologi, Yogyakarta, Sep. 6, 2024. [Online]. Available: <https://piat.ugm.ac.id>
- [78] Jokowi, "Perempuan dalam Ketahanan Pangan," Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada, May 12, 2020. [Online]. Available: <https://pengabdian.ugm.ac.id/2020/05/12/perempuan-dalam-ketahanan-pangan/>
- [79] Katadata, "Data 2023: PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Fak Fak Rp. 65,38 Juta," *Katadata*, Dec. 8, 2024. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/pdb/statistik/1d50f80c3a83c86/data-2023-pdrb-adhb-per-kapita-kabupaten-fak-fak-rp-65-38-juta>
- [80] D. Kusmana, "Pengaruh Sosialisasi oleh PPK terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009," *Blogspot*, Jul. 1, 2012. [Online]. Available: <http://dedikusmana435.blogspot.co.id/2012/07/pengaruh-sosialisasi-oleh-ppkterhadap.html>
- [81] P. Manurung, "Hari Raya Berlalu, Harga Cabai di Pasar Sei Sikambing Semakin Naik," *Mistar.id*, Jan. 15, 2025. [Online]. Available: <https://mistar.id/news/ekonomi/hari-raya-berlalu-harga-cabai-di-pasar-sei-sikambing-semakin-naik>
- [82] Medcom, "Kelaparan, 500 Perempuan Venezuela Terobos Perbatasan Kolombia," *Medcom.id*, Jul. 6, 2016. [Online]. Available: <https://www.medcom.id/internasional/amerika/gnlj1vvk-kelaparan-500-perempuan-venezuela-terobos-perbatasan-kolombia>
- [83] Mistar.id, *Potret Stunting di Pesisir Medan*, 2022. [Online]. Available: <https://mistar.id/news/medan/potret-stunting-di-pesisir-medan/>
- [84] S. Mufti, "Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD-PG) Kota Tanjungbalai Tahun 2021–2024," Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai, Oct. 20, 2023. [Online]. Available: <https://bapperida.tanjungbalaikota.go.id/>
- [85] Ombudsman Republik Indonesia, *Ketersediaan Pangan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, 2021. [Online]. Available: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ketersediaan-pangan-dalam-perspektif-pelayanan-publik>
- [86] Ombudsman Republik Indonesia, *Ketersediaan Pangan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, 2024. [Online]. Available: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ketersediaan-pangan-dalam-perspektif-pelayanan-publik>
- [87] Pemerintah Kota Tanjungpinang, *Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Tanjungpinang, 2021. [Online]. Available: <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariprodukhukum/1271>
- [88] RRI, *Jelang Ramadan, Harga Tomat dan Kentang Masih Tinggi*, 2023. [Online]. Available: <https://rri.co.id/ramadan/1348273/jelang-ramadan-harga-tomat-dan-kentang-masih-tinggi>
- [89] J. Sidik, "Pasar Murah Tuai Kritik, Komisi III DPRD Medan Kecewa Terhadap Kadis Diskop UKM Perindag," *Mimbar Umum Online*, 2024. [Online]. Available: <https://mimbarumum.co.id/pasar-murah-tuai-kritik-komisi-iii-dprd-medan-kecewa-terhadap-kadis-diskop-ukm-perindag/>
- [90] Simpang, *Harga Pangan Kota Medan*, 2024. [Online]. Available: <https://simpang.pemkomedan.go.id/?menu=harga>
- [91] Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Medan, *Data SIPD*, 2022. [Online]. Available: <https://siga.pemkomedan.go.id/old-siga/show/datashorted/sipd/150>

Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan Kepala Rumah Tangga Perempuan di Kecamatan Medan Helvetia (Annisya Zufais Hasibuan)

- [92] P. Stepvani and Y. Saragi, *Peta Persebaran Titik Hydrant Kecamatan Medan Helvetia* [Gambar], 2021. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/figure/gambar-3-peta-persebaran-titik-hydrant-kecamatan-medan-helvetia-kecamatan-medan-helvetia_fig2_349518678
- [93] UST, "Prof Posman Sibuea: Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pangan di Medan Hadirkan 50 Pemakalah," *UST.ac.id*, 2017. [Online]. Available: <https://www.ust.ac.id/prof-posman-sibuea-seminar-nasional-inovasi-teknologi-pangan-di-medan-hadirkan-50-pemakalah/>
- [94] World Bank, *Fact Sheet: An Adjustment to Global Poverty Lines*, 2022. [Online]. Available: <https://www.worldbank.org>

Sumber Lain:Disertasi/Tesis/Tugas Akhir

- [95] D. Banita, "Analisis ketersediaan pangan pokok dan pola konsumsi pada rumah tangga petani di Kabupaten Wonogiri," 2013.
- [96] R. Firdaus, "Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara," 2020.
- [97] D. R. Irjayanti, "Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah (studi pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu)," Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya, 2018.
- [98] A. Wardana, "Peran pemerintah dalam stabilisasi harga beras di Sulawesi Tengah = The role of government in stabilizing the prices of rice in Central Sulawesi," Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin, 2024.
- [99] R. Yolanda, "Peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie," Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry, 2020.